RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2025

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN MAGELANG

2024

SALINAN

BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa Pembangunan Daerah berperan penting dalam mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam mewujudkan sasaran pembangunan Daerah Tahun 2025 diperlukan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat pagu indikatif, program, kegiatan dan sub kegiatan;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025, diperlukan pengaturan tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

d. bahwa terhadap rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 telah dilakukan verifikasi dan selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Tanggal 8 Juli 2024 yang ditandatangi oleh Verifikator pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dan diketahui oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja PD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu periode Tahun 2025.
7. Renja PD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II
RENJA PD TAHUN 2025

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2025 memuat urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja dan rencana Tahun 2025 yang sertai pagu indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

(2) Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 dan RKPD Tahun 2025.

Pasal 3

(1) Renja PD Tahun 2025 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Anggaran 2025.

(2) Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
b. rencana kerja Dinas Kesehatan;
c. rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
e. rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
f. rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g. rencana kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
h. rencana kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
i. rencana kerja Dinas Pertanian dan Pangan;
j. rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup;
k. rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
l. rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
m. rencana kerja Dinas Perhubungan;
n. rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
o. rencana kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
p. rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
q. rencana kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
r. rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
s. rencana kerja Dinas Peternakan dan Perikanan;
t. rencana kerja Sekretariat Daerah;
u. rencana kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
v. rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
w. rencana kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
x. rencana kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
y. rencana kerja Inspektorat;
z. rencana kerja Kecamatan Salaman;
aa. rencana kerja Kecamatan Borobudur;
bb. rencana kerja Kecamatan Ngluwar;
cc. rencana kerja Kecamatan Salam;
dd. rencana kerja Kecamatan Srumbung;
ee. rencana kerja Kecamatan Dukun;
ff. rencana kerja Kecamatan Sawangan;
gg. rencana kerja Kecamatan Muntilan;
hh. rencana kerja Kecamatan Mungkid;
ii. rencana kerja Kecamatan Mertoyudan;
jj. rencana kerja Kecamatan Tempuran;
kk. rencana kerja Kecamatan Kajoran;
ll. rencana kerja Kecamatan Kaliangkrik;
mm. rencana kerja Kecamatan Bandongan;
nn. rencana kerja Kecamatan Candimulyo;
oo. rencana kerja Kecamatan Pakis;
pp. rencana kerja Kecamatan Ngablak;
qq. rencana kerja Kecamatan Grabag;
rr. rencana kerja Kecamatan Tegalrejo;
ss. rencana kerja Kecamatan Secang;
tt. rencana kerja Kecamatan Windusari; dan
uu. rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

(3) Isi beserta uraian Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 7 November 2024

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 7 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga Rancangan Rencana Kerja Organisai Perangkat Daerah (Rancangan Renja OPD) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang Tahun 2025 dapat tersusun. Renja ini disusun sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang.

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menangani Urusan Sosial, Urusan Keluarga Berencana dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam penyusunan Renja ini telah melewati tahapan pengkajian serta Verifikasi dari BAPPEDA Kabupaten Magelang. Tentunya dokumen ini masih jauh dari sempurna sehingga saran dan masukan dari berbagai pihak sangat membantu dalam penyempurnaan pada masa yang akan datang. Dokumen Renja SKPD yang telah tersusun ini diharapkan memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2025.

Kota Mungkid, 07 NOVEMBER 2024

KEPALA DINSOS PPKB PPPA
KABUPATEN MAGELANG



BELA RINARSI, SH, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670120 198703 2 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN ..... I- 1
1.1. Latar Belakang ..... I- 1
1.2. Landasan Hukum ..... I- 3
1.3. Maksud dan Tujuan ..... I- 5
1.4. Sistematika Penulisan ..... I- 8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD DINSOS PPKB PPPA ..... II- 1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 ..... II- 1

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH III-1
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional III-1
3.1. Tujuan dan Sasaran III-1

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD IV-1
4.1. Program dan Kegiatan Tahun 2024 ..... IV-1

BAB V PENUTUP V-1
5.1. Kesimpulan V-1
5.2. Kaidah Pelaksanaan V-2
5.3. Rencana Tindak Lanjut V-3

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar serta luasnya wilayah sebagai negara kepulauan yang tidak dibarengi dengan meratanya persebaran penduduk membuat Indonesia memiliki banyak permasalahan khususnya dalam hal kependudukan. Jumlah penduduk yang besar menjadi sebuah masalah tersendiri yang tidak dapat dihindarkan. Permasalahan terkait dengan penyediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas seakan menjadi masalah klasik yang selalu muncul.

Terkait dengan jumlah penduduk yang besar, permasalahan yang sering muncul adalah dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan. Kebutuhan akan bahan pokok menuntut orang untuk berkerja dan mencari nafkah. Namun, disisi lain penyedia lapangan kerja sangatlah minim. Masyarakat Indonesia lebih cenderung untuk menggantungkan diri terhadap pekerjaan dan cenderung mencari pekerjaan daripada membuka lapangan pekerjaan. Hal ini menyebabkan masalah baru yaitu pengangguran. Apabila jumlah pengangguran ini tinggi, maka rasio ketergantungan tinggi sehingga negara memiliki tanggungan yang besar untuk penduduknya yang dapat menghambat pembangunan dan menyebabkan tingkat kemiskinan menjadi tinggi. Sehingga kondisi penduduk yang besar di Indonesia harus menjadi perhatian khusus agar dapat meminimalkan timbulnya permasalahan yang lebih luas.

Jumlah penduduk yang besar memiliki andil dalam berbagai permasalahan lingkungan dan aspek lainnya. Aspek urusan sosial merupakan salah satu dari urusan wajib pelayanan dasar sehingga setiap pemerintah daerah wajib melaksanakan pelayanan dasar ini. Pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagian yang tak terpisahkan dengan pembangunan nasional. Pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dalam menangani permasalahan sosial ini, karena merupakan salah satu urusan pemerintah yang bersifat wajib. Oleh karena itu, perencanaan yang matang sangatlah diperlukan guna penentuan kebijakan terkait dengan tujuan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Secara struktur untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah menyusun Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 mengatur Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan peraturan dimaksud, terdapat 26 urusan wajib yang harus diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Dari 26 urusan wajib tersebut diantaranya adalah urusan Sosial, urusan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak, serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 mengatur tentang Satuan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah. Konsekuensi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang mengatur lembaga-lembaga di tingkat daerah yang mengurusi dan melaksanakan urusan pemerintah di daerah baik urusan wajib maupun pilihan. Lembaga otonom tersebut lahir setelah melalui proses revitalisasi, reorientasi dan restrukturisasi serta perumpunan peran birokrasi.

Dari proses revitalisasi, reorientasi dan restrukturisasi dan perumpunan peran birokrasi yang dilakukan executif bersama dengan legislatif menetapkan bahwa urusan Sosial, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Magelang diurus dan dilaksanakan oleh sebuah lembaga otonom ***"DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK***", yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang memiliki essensi :

1. Pemberdayaan dan peningkatan pelayanan.
2. Membelanjakan dana yang benar-benar diperlukan secara efisien.
3. Mengurangi beban yang menjadi urusan dan ditanggung pemerintah daerah dengan melakukan pengendalian penduduk.

Oleh karena itu perlu disusun perencanaan yang berpegang pada analisis lingkungan strategis, menitikberatkan pada essensi otonomi daerah bertolak pada suatu visi yang ingin dicapai ke depan.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD, Forum SKPD, penyusunan penyesuaian agenda kerja Tim Renja SKPD serta pengumpulan data dan informasi. Tim Penyusun Renja SKPD dipersiapkan oleh Kepala SKPD untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Orientasi mengenai renja digunakan untuk menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen, menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam penyusunan penyesuaian Renja SKPD. Penyusunan agenda kerja Tim Renja SKPD digunakan untuk membantu koordinasi dan integrasi antara proses penyusunan renja SKPD dengan Renstra SKPD. Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan, oleh karena itu sangat diperlukan data dan informasi yang akurat, relevan serta akuntabel.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang disusun berdasarkan kepada Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku, antara lain adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satpol PP Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010 – 2030(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31);
19. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
20. Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 1);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja adalah :

1. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang.
2. Menjamin berlangsungnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengendalian, pelaporan dan pengawasan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang.

3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara dokumen perencanaan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai penjabaran dari Renstra dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang sesuai tugas dan fungsinya.

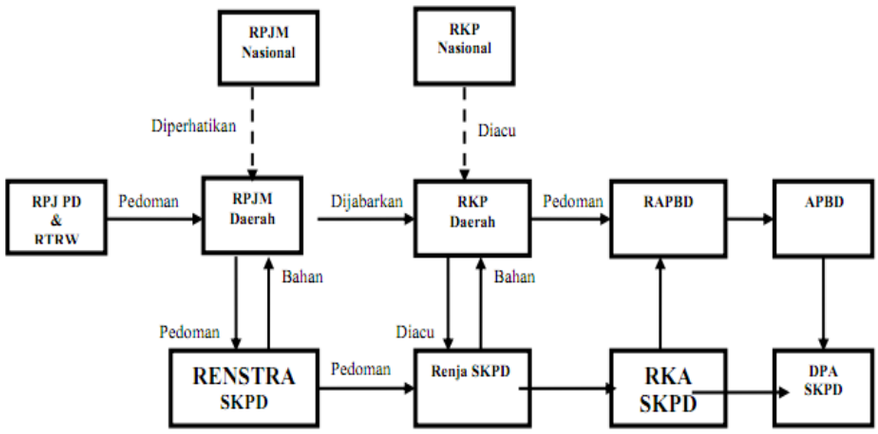
Tujuan dibuatnya Penyusunan Rancangan Awal Renja pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang Tahun 2025 adalah untuk :

1) Tersedianya dokumen perencanaan jangka pendek yang merupakan penjabaran Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 1 (satu) tahun mendatang;
2) Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Keterkaitan atau hubungan antara Renja, Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang dengan RPJMD Kabupaten Magelang dan RPJM Nasional disamping dengan Dokumen Perencanaan lainnya. Guna memahami posisi Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang dengan kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 1.2

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Hubungan antara Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang dengan Renstra dan RPD Kabupaten Magelang dengan dokumen perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Magelang yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, dan penyusunannnya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Magelang serta memperhatikan RPJP Nasional dan juga memuat arah kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja, kebijakan umum dan program kewilayahan.
2. Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang mengacu kepada RPD Kabupaten Magelang tahun 2025 - 2026 yang merupakan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran SKPD.
3. Dengan demikian dalam penyusunan rencana pembangunan yang terkait dengan proses penganggaran pada penyusunan Renja PD harus melihat program dan kegiatan serta pendanaan yang telah ditetapkan dalam tahapan-tahapan perencanaan tahunan yang tercantum dalam matriks Renja dan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang dan RPD Kabupaten Magelang Tahun 2025 – 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinsos PPKB PPPA Tahun 2023
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinsos PPKB PPPA
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinsos PPKB PPPA
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan Rancangan Awal Renja PD Dinsos PPKB PPPA Tahun 2025

BAB V. PENUTUP

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Kaidah dan Pelaksanaan
- 5.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DINSOS PPKB PPPA

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2024, serta mengacu pada APBD tahun 2023 yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Dinsos PPKB PPPA Tahun 2023

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinsos PPKB PPPA Tahun 2023 secara lengkap disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s.d. Tahun 2023
Kabupaten Magelang

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1.06	**BIDANG URUSAN SOSIAL**									
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase PSKS dapat melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)	10,10%	10,10%	10,10%	8,96%	88,71	10,10%	10,1%	100
1.06.02.2.03	**Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pembinaan	163 orang	NA	163 orang	199 orang	122,09	163 orang	362 orang	100
		Jumlah pendamping dan pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Pembinaan		25 orang						
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota		NA	100 orang	100 orang	100	100 orang	200 orang	

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang mendapatkan pembinaan	100 orang	100 orang						
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota		NA	21 orang	21 orang	100	21 orang	21 orang	
		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan	21 orang	21 orang						
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota		NA	42 lembaga	42 lembaga	100	43 lembaga	43 lembaga	
		Jumlah Lembaga Penyelenggara Usaha Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pembinaan	4 lembaga	4 lembaga						
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan dan penngemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti **	**100%**	**100%**	100%	94,10%	94,10	**100%**	**100%**	100
		Persentase PMKS lainnya di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar*		**0,05%**	0,05%	0,17%	100%	**0,05%**	**100%**	100
1.06.04.2.01	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	1425 orang	635 orang	1365 orang	653 orang	47,84	1425 orang	2.713 orang	100

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota		NA	164 orang	138 orang	84,15	164 orang	302 orang	
.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota		NA	30 orang	60 orang	100	30 orang	90 orang	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial		NA	741 orang	479 orang	64,64	1275 orang	1.754 orang	
		Jumlah anak bermasalah sosial yang mendapatkan penanganan sosial di luar panti	100 orang	5 orang						
		Jumlah gelandangan pengemis dan tuna sosial lainnya yang mendapatkan penanganan sosial di luar panti	50 orang	51 orang						
		Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan penanganan sosial	75 orang	381 orang						
		Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan penanganan sosial	100 orang	228 orang						
		Jumlah PMKS yang terfasilitasi dalam pengajuan bantuan sosial terencana	1000 proposal	1.112 proposal						
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta Bimbingan Sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota		NA	110 orang	233 orang	100	30 orang	263 orang	

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah keluarga dari anak yang bermasalah sosial yang mendapatkan penanaganan sosial di luar panti	30 keluarga	25 keluarga						
		Jumlah keluarga dari lanjut usia terlantar yang mendapatkan penanganan sosial	30 keluarga	431 keluarga						
		Jumlah keluarga dari penyandang disabilitas yang mendapatkan penanganan sosial	40 keluarga	228 orang						
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota		NA	250 orang	1.620 orang	100	125 orang	1.745 orang	
		Jumlah layanan Puskessos-SLRT yang terbentuk		1 unit						
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan Kabupaten/Kota		NA	40 orang	66 orang	100	40 orang	106 orang	
1.06.04.2.02	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis dan PMKS lainnya di luar panti yang mendapatkan penanganan dalam Rumah Singgah	75 orang	91 orang	70 orang	64 orang	91,43	75 orang	230 orang	100
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan Kabupaten/Kota		NA	70 orang	99 orang	141,43	75 orang	174 orang	
		Jumlah sasaran yang terlayani kebutuhan permakanan	75 orang	91 orang						

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota		NA	70 orang	99 orang	141,43	75 orang	174 orang	
		Jumlah sasaran yang terlayani kebutuhan sandang	75 orang	91 orang						
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan Kabupaten/Kota		NA	70 orang	92 orang	131,43	75 orang	167 orang	
		Jumlah sasaran yang mendapatkan layanan terminasi	75 orang	77 orang						
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial**	**57,59%**	**88,54%**	**72,38%**	**71,25%**	**98,44**	**57,59%**	**57,59%**	**100**
1.06.05.2.01	**Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**Jumlah anak terlantar yang terpelihara**		**27 orang**	**20 orang**	**51 orang**	**100**	**20 anak**	**98 anak**	
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang dijangkau kewenangan Kabupaten/Kota		NA	20 orang	51 orang	100	20 anak	71 orang	
		Jumlah Anak terlantar yang Terfasilitasi	20 orang	27 orang						
1.06.05.2.02	**Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah fakir miskin yang tertangani**	**73.262 orang**	**145.267 orang**	**92.081 orang**	**92.081 orang**	**100**	**121.187 orang**	**121.187 orang**	**100**
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata		NA	833.568 orang	852.513 orang	100	833.568 orang	833.568 orang	
		Jumlah Verifikasi dan Validasi Data Basis Terpadu (BDT) dan data PMKS	**6 kali**	12 kali	NA					

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kewenangan Kabupaten/Kota		NA	72.160 keluarga	72.160 keluarga	100	49.000 keluarga	72.160 keluarga	
		Jumlah KPM PKH yang terfasilitasi dalam Program Keluarga Harapan	49.000 KPM	75.478 KPM						
		Jumlah proposal yang terverifikasi	1100 Proposal	550 proposal						
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah KPM yang mendapatkan Bansos kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/Kota		NA	91.081 keluarga	136.344 keluarga	100	72.162 keluarga	136.344 keluarga	
		Jumlah KPM Penerima Bansos Pangan Yang Terfasilitasi	72.162 KPM	145.267 KPM						
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota		NA	20 kelompok	55 kelompok	100	250 orang		
		Jumlah Kelompok Penerima Manfaat Bansos	25 Kelompok	20 kelompok						
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100**
		Persentase PSKS yang terlibat dalam penanganan korban bencana		**6,47%**	**NA**					
1.06.06.2.01	**Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial**	**75 KK**	**123 KK**	**210 orang**	**549 orang**	**100**	**225 orang**		

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan Kabupaten/Kota		NA	210 orang	456 orang	100	225 orang	681 orang	
		Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasar pangannya	75 KK	123 KK						
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat		NA	100 orang	72 orang	72	150 orang	222 orang	
		Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasar sandangnya	50 KK	30 KK						
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat penampungan pengungsi kewenangan Kabupaten/Kota	40 lokasi	27 lokasi	39 lokasi	20 lokasi	51,28	40 unit	40 lokasi	100
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan Kabupaten/Kota		NA	75 orang	75 orang	100	75 orang	150 orang	
		Jumlah kelompok rentan yang mendapatkan penanganan khusus	20 kelompok	28 kelompok						
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Kabupaten/Kota		NA	210 orang	142 orang	67,62	210 orang	352 orang	
		Frekuensi layanan dukungan Psikososial	4 kali	3 kali						

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.06.06.2.02	**Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota**	**1 kali**	**1 kali**	**1 kali**	**1 kali**	**100**	**1 kali**	**1 kali**	**100**
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana kewenangan Kabupaten/Kota		NA	50 orang	50 orang	100	40 orang	90 orang	
		Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Diklat Tagana Muda	40 orang	30 orang						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja, OPD, dan keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan Perangkat Daerah**	**27 dokumen**	**27 dokumen**	**27 dokumen**	**27 dokumen**	**100**	**27 dokumen**	**27 dokumen**	**100**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		NA	25 laporan	25 laporan	100	24 laporan		
		Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun	8 dokumen	8 dokumen						
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun	12 dokumen	12 dokumen						

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen						
		Jumlah Dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang tersusun (RTP dan Evaluasi RTP)	2 dokumen	2 dokumen						
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah**		**8 Sub Kegiatan**	**8 Sub Kegiatan**	**8 Sub Kegiatan**	**100**	**8 sub kegiatan**	**8 sub kegiatan**	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		NA	170 laporan	170 laporan	100	170 laporan		
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang diselenggarakan		115 kali						
		Jumlah rapat yang diselenggarakan		16 kali						
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang diselenggarakan		74 kali						
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan**	**8 Sub Kegiatan**	**8 Sub Kegiatan**	**8 Sub Kegiatan**	**8 Sub Kegiatan**	**100**	**8 sub kegiatan**	**8 sub kegiatan**	**100**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		NA	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	24 laporan	
		Jumlah surat yang dikelola	4000 surat	4000 surat						
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan		NA	108 laporan	142 laporan	100	168 laporan	310 laporan	
		Jumlah rekening tagihan yang dibayarkan	108 rekening	108 rekening						
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan**	**NA**	**NA**	**3 jenis**	**3 jenis**	**100**	**3 jenis**	**6 jenis**	

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan		**8 Sub Kegiatan**						
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	NA	6 unit	6 unit	100	10 unit	16 unit	
		Jumlah Paket Pengadaan Peralatan	-	6 paket						
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	-	5 paket	-	-	-	30 unit		
	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah DED Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	2 paket	-	-	-			
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan**	**8 Sub Kegiatan**	**8 Sub Kegiatan**	**8 Sub Kegiatan**	**8 Sub Kegiatan**	**100**	**8 sub kegiatan**	**8 sub kegiatan**	**100**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya		NA	123 unit	123 unit	100	123 unit	123 unit	
		Jumlah kendaraan roda dua yang dipelihara	108 unit	108 unit						
		Jumlah kendaraan roda empat yang dipelihara	13 unit	13 unit						
		Jumlah kendaraan roda tiga yang dipelihara	1 unit	1 unit						
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		NA	24 unit	24 unit	100	24 unit	24 unit	
		Jumlah peralatan dapur umum yang dipelihara	2 paket	2 paket						
		Jumlah peralatan Mupen yang dipelihara	1 paket	1 paket						
		Jumlah peralatan Muyan yang dipelihara	1 paket	1 paket						
		Jumlah peralatan yang dipelihara	20 peralatan kantor	20 peralatan kantor						

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *(Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Kantor dan Bangunan Lainnya)*	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		NA	3 unit	3 unit	100	3 unit	6 unit	
		Luas gedung kantor yang dipelihara	12.616 m2	12.616 m2						
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah kegiatan yang dikelola**	**24 kegiatan**	**25 kegiatan**	**25 kegiatan**	**25 kegiatan**	**100**			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	51 orang/bulan	44 orang/bulan	86,27	40 orang/bulan		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD		NA	12 dokumen	12 dokumen	100	13 dokumen		
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun	12 dokumen	12 dokumen						
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen kepegawaian yang tersusun**	**4 dokumen**	**4 dokumen**	**4 dokumen**	**4 dokumen**	**100**	**4 dokumen**	**12 dokumen**	**100**
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai		NA	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	
		Frekuensi pembinaan ASN	3 kali	3 kali						
		Jumlah ASN yang dibina	43 orang	60 orang						
		Jumlah tenaga honorer/kontrak	3 orang	3 orang						
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya	49 orang	45 orang						
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.08	**BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase lembaga yang melaksanakan PUG**	**5,70%**	**4,76%**	**5,24%**	**5,24%**	**100**	**5,24%**	**5,24%**	**91,92**
		Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya		**14,46%**	-	-	-			
2.08.02.2.01	**Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah lembaga yang melaksanakan PUG**	**14 lembaga**	**10 lembaga**	**10 lembaga**	**10 lembaga**	**100**	**10 lembaga**	**30 lembaga**	**100**
2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota *(Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG)*	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) kewenangan Kabupaten/Kota		NA	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	100	10 Perangkat Daerah	20 perangkat daerah	
		Jumlah perangkat Desa yang mewakili PUG	420 orang	175 orang						
		Jumlah SKPD Penyususn PPRG	10 SKPD	5 SKPD						

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.08.02.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah perempuan yang terlibat dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota**	**550 orang**	**155 orang**	**500 orang**	**500 orang**	**100**	**500 orang**	**1155 orang**	**100**
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan Kabupaten/Kota			1 organisasi	1 organisasi	100	1 organisasi	2 organisasi	
		Jumlah perempuan yang aktif di KPPI	550 orang	200 orang						
2.08.02.2.03	**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah organisasi perempuan yang dibina**	**20 organisasi**	**4 orang**	**19 organisasi**	**19 organisasi**	**100**	**19 organisasi**	**38 organisasi**	**100**
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi perempuan yang dibina dan aktif	20 organisasi	4 organisasi	19 organisasi	19 organisasi	100			
		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia						1 dokumen		
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani sesuai standar**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100**

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.08.03.2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota**	**3 layanan**	**3 layanan**	**3 layanan**	**3 layanan**	**100**	**3 layanan**	**3 layanan**	**100**
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota		NA	3 layanan	3 layanan	100	3 layanan	3 layanan	
		Jumlah kasus perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan, pengarahan oleh petugas terlatih	66 kasus	71 kasus						
		Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang memiliki SDM dan sarpras sesuai standar	4 lembaga	4 lembaga						
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standart**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100**
2.08.06.2.01	**Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah pelembagaan PHA yang terbentuk**	**15 lembaga**	**15 lokasi**	**15 lokasi**	**15 lokasi**	**100**	**15 lokasi**	**45 lokasi**	**100**

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media, dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media, dan dunia usaha			25 organisasi	25 organisasi	100	25 organisasi	50 organisasi	
		Jumlah Desa Layak Anak	10 desa	10 desa						
		Jumlah Forum anakyang terbentuk	10 forum	10 Forum						
		Jumlah Kampung Anak Sejahtera yang terbentuk	5 desa	5 desa						
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standart**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100**
2.08.07.2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota**	**3 layanan**	**3 layanan**	**3 layanan**	**3 layanan**	**100**	**3 layanan**	**3 layanan**	**100**
2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK *(Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota)*	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan *(Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota)*		NA	3 layanan	3 layanan	100	3 layanan	3 layanan	100
		Jumlah kasus anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan, pengarahan oleh petugas terlatih	57 kasus	58 kasus						

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang memiliki SDM dan sarpras sesuai standar	4 lembaga	4 lembaga						
2.14	**BIDANG URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Usia Kawin Pertama (UKP)**	**22 tahun**	**22,72 tahun**	**21,80 tahun**	**22,70 tahun**	**100**	**22,70**	**22,72**	**100**
2.14.02.2.02	**Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) minimal 20 tahun**	**120.088 PUS**	**191.102 PUS**	**10.171 PUS**	**140.492 PUS**	**100**	140.492	**191.102**	**100**
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan system informasi keluarga	-	-	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	2 laporan	
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah data dan informasi keluarga yang tersedia		NA	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	
		Jumlah Data Kepala Keluarga yang tervalidasi	40.713 KK	403.313 KK						
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	-	-	184 laporan	184 laporan	100	184 laporan	368 laporan	
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) *(Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga)*	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga *Jumlah Profil Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga yang Tersusun)*	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	100
		Jumlah IMP dan PLKB yang mendapatkan sosialisasi UKP	422	414 orang						
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Cakupan PUS yang ingin ber-KB dan tidak terpenuhi (Unmet Need)**	**12,42%**	**13,40%**	**12,98%**	**11,71%**	**100**	12,42%	**11,71%**	
		Persentase Peserta KB Aktif menggunakan alat kontrasepsi modern (mCPR)	**72,10%**	**68,60%**	**71,20%**	**71,85%**	**100**	**72,1%**	**71,85%**	**99,65**
		Persentase Perangkat Daerah dan Lembaga yang berperan dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	**25%**	**16%**	**29,83%**	**60%**	**100**	**25%**	**60%**	**100**
2.14.03.2.01	**Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Frekuensi KIE Program Bangga Kencana**	**50 kali**	**20 kali**	**50 kali**	**50 kali**	**100**	**50 kali**	**120 kali**	**100**
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah laporan pengendalian Program KKBPK		NA	2 laporan	2 laporan	100	21 laporan		
		Jumlah Balai KB yang terfasilitasi	21 Balai KB	21 Balai KB						

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana *(Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK)*	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) *(Jumlah laporan hasil pengelolaan operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK)*	-	-	5 laporan	5 laporan	100	5 laporan	10 laporan	
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) *(Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Minilokakarya)*	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) *(Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok))*	-	-	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	8 laporan	

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang *(Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang)*	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetakdan Elektronik serta Media Luar Ruang *(Jumlah dokumen Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang)*		-	5 dokumen	5 dokumen	100	5 dokumen	10 dokumen	
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal *(Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal)*	Jumlah dokumen komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai kearifan budaya local			4 dokumen	4 dokumen	100	1 dokumen	5 dokumen	
		Jumlah Desa yang melaksanakan program KKBPK oleh IMP	372 desa	372 desa						
		Jumlah PUS yang mengetahui paling sedikit 1(satu) alat atau cara KB modern	188.800 PUS	185.600 PUS						
2.14.03.2.01.0001	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada stakeholder dan mitra kerja	-	-	25 organisasi	25 organisasi	100	25 organisasi	50 organisasi	

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.14.03.2.02	**Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah kader KB dan PKB yang diberdayakan**	**-**	**-**	**422 orang**	**422 orang**	**100**	**422 orang**	**422 orang**	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader yang mengikuti Penggerakan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-	-	372 orang	372 orang	100	372 orang	372 orang	
2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB *(Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB)*	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB *(Jumlah organisasi yang mengikuti Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB)*	-	-	2 organisasi	2 organisasi	100	2 organisasi	4 organisasi	
2.14.03.2.03	**Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah PUS yang terlayani kesertaan ber-KB**	**148.200 PUS**	**139.664 PUS**	**146.200 PUS**	**144.786 PUS**	**99,03**	**148.200 PUS**	**148.200 PUS**	**100**
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya		NA	58 laporan	58 laporan	100	1 lapporan	59 laporan	

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah momentum penyelenggaraan kegiatan	5 momentum	5 momentum						
		Jumlah peserta KB MKJP yang terlayani	2000 akseptor	49.894 Akseptor						
		Jumlah Peserta KB Non MKJP yang terlayani	94.200 akseptor	89.770 Akseptor						
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	-	10.331 PUS	53.127 PUS	514,25	10.331 PUS	53.127 PUS	
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	NA	4 jenis	30 unit	30 unit	100	30 unit		
		Persentase Perangkat Daerah dan lembaga yang berperan dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	25%							
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	-	-	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	8 laporan	
2.14.03.2.04	**Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Jumlah lembaga yang berperan dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB**	**12 unit**	**8 unit**	**10 unit**	**10 unit**	**100**	**10**	**20 unit**	**100**
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	4 dokumen	

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas *(Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB)*	Jumlah Kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung KB			118 kampung	372 kampung	315,25	10 kampung	372 kampung	
		Jumlah Kampung KB terbentuk dan terevaluasi	10 lokasi	10 lokasi						
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Cakupan Pembangunan Ketahanan Keluarga**	**62,29%**	**58,50%**	**60,30%**	**72,68%**	**120,53**	**62,29%**	**72,68%**	**100**
2.14.04.2.01	**Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Poktan yang dibina dan dievaluasi Program Pembangunan Ketahanan Keluarga**	**84 kelompok**	**84 kelompok**	**84 kelompok**	**84 kelompok**	**100**	**84 kelompok**	**252 kelompok**	**100**
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah laporan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)			5 laporan	5 laporan	100	5 laporan	10 laporan	
		Jumlah Anggota BKB yang Dibina dan menjadi Peserta KB	300 orang	150 orang						
		Jumlah Anggota BKL yang Dibina dan menjadi Peserta KB	300 orang	150 orang						
		Jumlah Anggota BKR yang Dibina dan menjadi Peserta KB	200 orang	150 orang						

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Anggota Kelompok PIK Remaja masyarakat di Kampung KB yang menjadi sasaran Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja	500 orang	120 orang						
		Jumlah Anggota UPPKS dari Keluarga Prasejahtera yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan ketrampilan ketahanan ekonomi	321 orang	120 orang						
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	-	20 unit	30 unit	150	20 unit	50 unit	
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	-	3.005 orang	3.005 orang	100	3.005 orang	3.005 orang	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Penilaian predikat kinerja didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 Tentang, Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Adapun interval pemeringkatan predikat kinerja sebagai berikut.

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang selama kurun waktu 2023 sampai 2024 telah melakukan beberapa program dan kegiatan, adapun hasil kinerja tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Table 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DINSOS PPKB PPPA Kabupaten Magelang

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024 Triwulan II	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan Perangkat Daerah.			100	100	100	100	100	30.6	100	100	
2	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah			27	27	32	31	27	7	32	31	
3	Jumlah dokumen rencana kerja perangkat daerah yang tersusun			2	2	5	4	2	0	5	4	
4	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			25	25	27	27	25	7	27	27	
5	Jumlah kegiatan yang dikelola			25	24	25	25	25	25	25	25	
6	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN			51	14	44	44	44	37	44	44	
7	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12	12	12	12	12	3	12	12	
8	Jumlah dokumen kepegawaian yang tersusun			4	4	4	4	4	1	4	4	
9	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai			1	1	4	4	1	1	4	4	
10	Jumlah pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			8	8	2	2	8	0	2	2	
11	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			170	170	100	100	170	329	100	100	
12	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan			3	3	11	11	3	1	11	11	
13	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan			6		6	6	6		6	6	
14	Jumlah paket mebel yang disediakan								10			
15	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan			8	8	3	3	8	8	3	3	
16	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat			12	12	12	12	12	3	12	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air, dan listrik yang disediakan			108	168	132	132	142	45	132	132	
18	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan			8	8			8	8			
19	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			24	24	5	5	24	9	5	5	
20	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya			123	123	125	125	123	25	125	125	
21	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			3	3	3	3	3	3	3	3	
22	Persentase PSKS dapat melaksanakan usaha kesejahteraan sosial (UKS)			10,10	10,10	11	11	8,96	4	11	11	
23	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang mendapatkan pembinaan			163	163	171	171	199	112	171	171	
24	Jumlah orang yang mendapat kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota			100	100	50	50	100	50	50	50	
25	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/kota yang meningkat kapasitasnya kwenangan kabupaten/kota			21	21	21	21	21	21	21	21	
26	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota			42	43	42	42	42	41	42	42	
27	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, dan Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti **			100	100	100	100	94,10	28	100	100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase PMKS lainnya di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar*			0,05	0,05			0,17				
28	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, beserta keluarganya, Gelandangan dan Pengemis, yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**			1.365	1.425	1976	1976	653	401	1976	1976	
29	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota			164	164	165	165	138	0	165	165	
30	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota			30	30	30	30	60	22	30	30	
31	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial			741	1275	741	741	479	255	741	741	
32	Jumlah peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan kabupaten/kota			110	30	700	700	233	60	700	700	
33	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota			250	125	300	300	1.620	60	300	300	
34	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota			40	40	40	40	66	34	40	40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis, dan PMKS lainnya di luar panti yang mendapatkan penanganan dalam rumah singgah			70	75	80	80	64	44	80	80	
36	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota			70	75	80	80	99	44	80	80	
37	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan kabupaten/kota			70	75	80	80	99	35	80	80	
38	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota			70	75			92	39			
39	Persentase fakir miskin yang mendapatkan Perlindungan dan jaminan sosial			72,38	57,59	89,9	89,9	71,25	95	89,9	89,9	
40	Jumlah Anak terlantar yang terpelihara			20	20	20	20	51	17	20	20	
41	Jumlah anak terlantar yang dijangkau kewenangan kabupaten/kota			20	20	20	20	51	17	20	20	
42	Jumlah Fakir Miskin Yang Tertangani			92.081	73.262	852.813	852.813	92.081	134453	852.813	852.813	
43	Jumlah fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota yang didata			833.568	833.568	852.813	852.813	852.513	786317	852.813	852.813	
44	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota			72.160	49.000	72.160	72.160	72.160	68713	72.160	72.160	
45	Jumlah KPM yang mendapatkan bansos kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota			91.081	72.162	140.000	140.000	136.344	209499	140.000	140.000	
46	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota			20	250	100	100	55	550	100	100	
47	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten**			100	100	100	100	100		100	100	
48	Persentase PSKS yang terlibat dalam penanganan korban bencana			8,22	8,22			20,72				
49	Jumlah Korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial			210	75	350	350	549	74	350	350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota			210	225	350	350	456	74	350	350	
51	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat			100	150	100	100	72	25	100	100	
52	Jumlah tempat penampungan pengungsi kewenangan kabupaten/kota			39	40	39	39	20	0	39	39	
53	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentanlayanan rujukan kewenangan kabupaten/kota			75	75	50	50	75	13	50	50	
54	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan kabupaten/kota			210	210	50	50	142	55	50	50	
55	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			1	1	1	1	1	1	1	1	
56	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi,sosialisasi, dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten/kota			50	40	50	50	50	25	50	50	
57	Usia Kawin Pertama (UKP)			21,80	22	22,79	22,79	22,70	23	22,79	22,79	
58	Jumlah Usia Perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) minimal 20 tahun			10.171	120.088	120.100	120.100	140.492	157199	120.100	120.100	
59	Jumlah profil kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang tersusun			1	1	1	1	1	1	1	1	
60	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga			1	1	2	2	1	1	2	2	
61	Jumlah data dan informasi keluarga yang tersedia			1	1	1	1	1	1	1	1	
62	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga			184	184	184	184	184	60	184	184	
63	Jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB			1	1	1	1	1	1	1	1	
64	Cakupan PUS yang ingin ber KB dan tidak terpenuhi (unmet need)			12,98	12,42	12,32	12,2	11,71	11.45	12,32	12,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	Presentase peserta KB aktif menggunakan alat kontrasepsi modern (mCPR)			71,20	72,10	72,1	72,1	71,85		72,1	72,1	
66	Persentase perangkat daerah dan lembaga yang berperan dalam pembangunan daerah melalui kampung KB			29,83	25			60				
67	Frekuensi KIE Program Bangga Kencana			50	50	50	50	50	45	50	50	
68	Jumlah dokumen komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai sesuai kearifan budaya lokal			4	4	4	4	4	1	4	4	
69	Jumlah laporan pengendalian Program KKBPK			2	2	2	2	2	21	2	2	
70	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada stakeholder dan mitra kerja			25	25	25	25	25	25	25	25	
71	Jumlah dokumen Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang			5	5	4	4	5	2	4	4	
72	Jumlah Laporan Mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini lokakarya			4	4	21	21	4	1	21	21	
73	Jumlah laporan hasil Pengelolaan operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK			5	5	21	21	5	5	21	21	
74	Jumlah kader KB dan PKB yang diberdayakan			422	422	415	415	422	422	415	415	
75	Jumlah organisasi yang mengikuti Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB			2	2			2				
76	Jumlah kader yang mengikuti Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)			372	372	372	372	372	372	372	372	
77	Jumlah PUS yang terlayani kesertaan ber-KB			146.200	148.200	148.200	148.200	144.786	141897	148.200	148.200	
78	Jumlah laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya			58	58	62	62	58	1	62	62	
79	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			10.331	10.331	10.331	10.331	53.127	5554	10.331	10.331	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB			30	30	21	21	30	24	21	21	
81	Jumlah laporan hasil Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya			4	4	4	4	4	1	4	4	
82	Jumlah lembaga yang berperan dalam pembangunan daerah melalui kampung KB			10	12	12	12	10	10	12	12	
83	Jumlah Kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program bangga kencana di Kampung KB			118	10	372	372	372	10	372	372	
84	Jumlah dokumen hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			2	2	2	2	2	2	2	2	
85	Cakupan pembangunan ketahanan keluarga			60,30	62,29	62,29	62,29	72,68	37.58	62,29	62,29	
86	Jumlah Poktan Yang Dibina Dan Dievaluasi Program Pembangunan Ketahanan Keluarga			84	84	84	84	84	21	84	84	
87	Jumlah laporan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			5	5	5	5	5	5	5	5	
88	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)			20	20	20	20	30	0	20	20	
89	Jumlah kader pengelola dan pelaksanan (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga /UPPKS)			3.005				3.005				
90	Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standart			100	100	100	100	100	100	100	100	
91	Jumlah Pelembagaan PHA yang terbentuk			15	15	25	25	15	5	25	25	
92	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media, dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media, dan dunia usaha			25	25	25	25	25	25	25	25	
93	Persentase lembaga yang melaksanakan PUG			5,24	5,70	5,7	5,7	5,24		5,7	5,7	
94	Jumlah lembaga yang melaksanakan PUG			10	14	10	10	10	0	10	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan responsif gender (PPRG) kewenangan Kabupaten/Kota			10	10	10	10	10	9	10	10	
96	Jumlah organisasi perempuan yang dibina			19	20	19	19	19	20	19	19	
97	Jumlah organisasi perempuan yang dibina dan aktif			19	20	19	19	19	20	19	19	
98	Jumlah perempuan yang terlibat dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota			500	550			500	0			
99	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan Kabupaten/Kota			1	1	1	1	1	0	1	1	
100	Persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani sesuai standar			100	100	100	100	100	100	100	100	
101	Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukankoordinasi kewenangan kabupaten/kota			3	3	3	3	3	3	3	3	
102	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota			3	3	3	3	3	6	3	3	
103	Persentase anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standart			100	100	100	100	100	100	100	100	
104	Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota			3	3	3	3	3	3	3	3	
105	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota			3	3	3	3	3	3	3	3	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Pelayanan SKPD tidak lepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Untuk mengidentifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka diperlukan pendekatan berdasarkan aspek gambaran pelayanan Perangkat Daerah, Kajian terhadap Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota, Kajian terhadap Renstra Kementerian/Lembaga, Kajian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Untuk menguraikan aspek gambaran pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggunakan pendekatan capaian kinerja akhir periode renstra sebelumnya. Kajian terhadap Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota dan Renstra Kementerian/Lembaga digunakan sebagai perbandingan capaian kinerja. Kajian Rencana Tata Ruang dan Wilayah mendukung penentuan sasaran pemberdayaan masyarakat. Sedangkan rekomendasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis tentunya menjadi panduan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD terkait dengan kelestarian lingkungan/pembangunan berwawasan lingkungan.

Permasalahan yang dihadapi SKPD menjadi pembuka identifikasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan pelayanan SKPD. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Pada tabel berikut ini merupakan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berikut faktor pendorong dan penghambatnya.

1.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

DINSOS PPKB PPPA dalam pengusulan program, kegiatan dan PAGU anggaran tahun 2025 pada RKPD dan Renja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Magelang

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja, OPD, dan keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**6.407.460.125**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja, OPD, dan keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**7.258.334.501**	
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan Perangkat Daerah**	**32 dokumen**	**16.000.000**	**Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan Perangkat Daerah**	**32 dokumen**	**16.000.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Magelang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dokumen	8.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Magelang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dokumen	8.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Magelang	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	27 dokumen	8.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Magelang	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	27 dokumen	8.000.000	
1.2	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen administrasi umum yang tersusun**	**2 dokumen**	**70.000.000**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen administrasi umum yang tersusun**	**2 dokumen**	**74.200.000**	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Magelang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 laporan	70.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Magelang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 laporan	74.200.000	Kebutuhan dana lebih tinggi
1.3	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan**	**2 sub kegiatan**	**122.434.451**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan**	**2 sub kegiatan**	**129.999.996**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Magelang	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	30.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Magelang	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	30.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Magelang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	132 laporan	92.434.451	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Magelang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	132 laporan	99.999.996	Kebutuhan dana lebih tinggi
1.4	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan**	**11 jenis**	**60.000.000**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan**	**11 jenis**	**60.000.000**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Magelang	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 unit	30.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Magelang	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 unit	30.000.000	
	Pengadaan Mebel	Kab. Magelang	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 jenis	30.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Magelang	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 jenis	30.000.000	
1.5	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan**	**3 sub kegiatan**	**365.000.000**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan**	**3 sub kegiatan**	**964.004.365**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Magelang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	125 unit	150.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Magelang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	125 unit	691.983.320	Kebutuhan dana lebih tinggi
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Magelang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 unit	15.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Magelang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 unit	20.000.000	Kebutuhan dana lebih tinggi
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Magelang	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Magelang	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	252.021.045	Kebutuhan dana lebih tinggi
1.6	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah kegiatan yang dikelola**	**25 kegiatan**	**5.699.025.673**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah kegiatan yang dikelola**	**25 kegiatan**	**5.939.130.140**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Magelang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	44 orang/ bulan	5.672.025.673	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Magelang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	44 orang/ bulan	5.884.130.140	Kebutuhan dana lebih tinggi
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Magelang	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	27.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Magelang	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	55.000.000	Kebutuhan dana lebih tinggi
1.7	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen kepegawaian yang tersusun**	**4 dokumen**	**75.000.000**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen kepegawaian yang tersusun**	**4 dokumen**	**75.000.000**	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Magelang	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	4 dokumen	75.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Magelang	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	4 dokumen	75.000.000	
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**		Persentase PSKS dapat melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)	11%	220.000.000	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**		Persentase PSKS dapat melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)	11%	360.000.000	
2.1	**Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pembinaan	171 orang	220.000.000	**Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pembinaan	171 orang	360.000.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magelang	Jumlah orang yang mendapatkan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	40.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magelang	Jumlah orang yang mendapatkan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	40.000.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magelang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	21 orang	140.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magelang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	21 orang	280.000.000	Kebutuhan dana lebih tinggi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magelang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	42 lembaga	40.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magelang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	42 lembaga	40.000.000	
3	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan dan penngemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti **	**100%**	3.475.000.000	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan dan penngemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti **	**100%**	**2.816.000.000**	
3.1	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	1.976 orang	3.370.000.000	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	1.976 orang	2.711.000.000	
	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Magelang	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota	165 orang	420.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Magelang	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota	165 orang	150.000.000	Kebutuhan dana lebih rendah
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Magelang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota	30 orang	15.000.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Magelang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota	30 orang	15.000.000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Magelang	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual,	741 orang	2.800.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Magelang	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual,	741 orang	2.321.000.000	Kebutuhan dana

			dan sosial					dan sosial			lebih rendah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Magelang	Jumlah peserta Bimbingan Sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	700 orang	70.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Magelang	Jumlah peserta Bimbingan Sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	700 orang	70.000.000	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Magelang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota	300 orang	50.000.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Magelang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota	300 orang	140.000.000	Kebutuhan dana lebih tinggi
	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Magelang	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	15.000.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Magelang	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	15.000.000	
3.2	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis dan PMKS lainnya di luar panti yang mendapatkan penanganan dalam Rumah Singgah	80 orang	105.000.000	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis dan PMKS lainnya di luar panti yang mendapatkan penanganan dalam Rumah Singgah	80 orang	105.000.000	
	Penyediaan Permakanan	Kab. Magelang	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang	75.000.000	Penyediaan Permakanan	Kab. Magelang	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang	75.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Sandang	Kab. Magelang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang	15.000.000	Penyediaan Sandang	Kab. Magelang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang	15.000.000	
	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Magelang	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	15.000.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Magelang	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	15.000.000	
			Jumlah sasaran yang mendapatkan layanan terminasi					Jumlah sasaran yang mendapatkan layanan terminasi			
4	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**		**Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial**	**88,9%**	**6.923.345.100**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**		**Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial**	**88,9%**	**7.123.345.100**	
4.1	**Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**		**Jumlah anak terlantar yang terpelihara**	**20 anak**	**50.000.000**	**Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**		**Jumlah anak terlantar yang terpelihara**	**20 anak**	**50.000.000**	
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kab. Magelang	Jumlah anak terlantar yang dijangkau kewenangan Kabupaten/Kota	20 anak	50.000.000	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kab. Magelang	Jumlah anak terlantar yang dijangkau kewenangan Kabupaten/Kota	20 anak	50.000.000	
4.2	**Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah fakir miskin yang tertangani**	**852.813 orang**	**6.873.345.100**	**Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah fakir miskin yang tertangani**	**852.813 orang**	**7.073.345.100**	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Magelang	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	852.813 orang	100.000.000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Magelang	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	852.813 orang	100.000.000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Magelang	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kewenangan Kabupaten/Kota	72.160 keluarga	100.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Magelang	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kewenangan Kabupaten/Kota	72.160 keluarga	100.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Magelang	Jumlah KPM yang mendapatkan Bansos kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	140.000 keluarga	6.623.345.100	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Magelang	Jumlah KPM yang mendapatkan Bansos kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	140.000 keluarga	6.823.345.100	Kebutuhan dana lebih tinggi
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Magelang	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	50.000.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Magelang	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	50.000.000	
5	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**		**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten**	**100%**	**225.000.000**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**		**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten**	**100%**	**225.000.000**	
5.1	**Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**		**Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial**	**350 orang**	**195.000.000**	**Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**		**Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial**	**350 orang**	**195.000.000**	
	Penyediaan Makanan	Kab. Magelang	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan Kabupaten/Kota	350 orang	75.000.000	Penyediaan Makanan	Kab. Magelang	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan Kabupaten/Kota	350 orang	75.000.000	
	Penyediaan Sandang	Kab. Magelang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat	100 orang	30.000.000	Penyediaan Sandang	Kab. Magelang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan 3kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat	100 orang	30.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Magelang	Jumlah tempat penampungan pengungsi kewenangan Kabupaten/Kota	39 lokasi	30.000.000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Magelang	Jumlah tempat penampungan pengungsi kewenangan Kabupaten/Kota	39 lokasi	30.000.000	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Magelang	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan Kabupaten/Kota	50 oranng	30.000.000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Magelang	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan Kabupaten/Kota	50 oranng	30.000.000	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Magelang	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	30.000.000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Magelang	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	30.000.000	
5.2	**Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**		**Jumlah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota**	**1 kali**	**30.000.000**	**Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**		**Jumlah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota**	**1 kali**	**30.000.000**	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Magelang	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	30.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Magelang	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	30.000.000	
6	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**		**Persentase lembaga yang melaksanakan PUG**	**5,7%**	**90.000.000**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**		**Persentase lembaga yang melaksanakan PUG**	**5,7%**	**90.000.000**	
6.1	**Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Jumlah lembaga yang melaksanakan PUG**	**10 lembaga**	**30.000.000**	**Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Jumlah lembaga yang melaksanakan PUG**	**10 lembaga**	**30.000.000**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Kab. Magelang	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) kewenangan Kabupaten/Kota	10 lembaga	30.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Kab. Magelang	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) kewenangan Kabupaten/Kota	10 lembaga	30.000.000	
6.2	**Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Jumlah perempuan yang terlibat dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota**	**500 orang**	**30.000.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Jumlah perempuan yang terlibat dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota**	**500 orang**	**30.000.000**	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Magelang	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan Kabupaten/Kota	1 organisasi	30.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Magelang	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan Kabupaten/Kota	1 organisasi	30.000.000	
6.3	**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Jumlah organisasi perempuan yang dibina**	**19 organisasi**	**30.000.000**	**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Jumlah organisasi perempuan yang dibina**	**19 organisasi**	**30.000.000**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magelang	Jumlah dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	1 dokumen	30.000.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magelang	Jumlah dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	1 dokumen	30.000.000	
7	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**		**Persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani sesuai standar**	**100%**	**70.000.000**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**		**Persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani sesuai standar**	**100%**	**70.000.000**	
7.1	**Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota**	**3 layanan**	**70.000.000**	**Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota**	**3 layanan**	**70.000.000**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magelang	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota	3 layanan	70.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magelang	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota	3 layanan	70.000.000	
8	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**		**Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standart**	**100%**	**70.000.000**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**		**Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standart**	**100%**	**144.472.881**	
8.1	**Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Jumlah pelembagaan PHA yang terbentuk**	**25 organisasi**	**70.000.000**	**Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan**		**Jumlah pelembagaan PHA yang terbentuk**	**25 organisasi**	**144.472.881**	

						Kabupaten/Kota					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media, dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media, dan dunia usaha	25 organisasi	70.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media, dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media, dan dunia usaha	25 organisasi	144.472.881	Kebutuhan dana lebih tinggi
9	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**		**Persentase anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standart**	**100%**	**70.000.000**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**		**Persentase anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standart**	**100%**	**70.000.000**	
9.1	**Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota**	**3 layanan**	**70.000.000**	**Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota**	**3 layanan**	**70.000.000**	
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kab. Magelang	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	3 layanan	70.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kab. Magelang	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	3 layanan	70.000.000	
10	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**		**Usia Kawin Pertama (UKP)**	**22,79 tahun**	**519.400.000**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**		**Usia Kawin Pertama (UKP)**	**22,79 tahun**	**660.573.918**	
10.1	**Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) minimal 20 tahun**	**120.100**	**519.400.000**	**Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) minimal 20 tahun**	**120.100**	**660.573.918**	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kab. Magelang	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan	2 laporan	60.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi	Kab. Magelang	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan	2 laporan	60.000.000	

			system informasi keluarga			Keluarga		system informasi keluarga			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Magelang	Jumlah data dan informasi keluarga yang tersedia	1 dokumen	25.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Magelang	Jumlah data dan informasi keluarga yang tersedia	1 dokumen	153.035.833	Kebutuhan dana lebih tinggi
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Magelang	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	184 laporan	290.400.000	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Magelang	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	184 laporan	290.400.000	
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Magelang	Jumlah dokumen pengelolaan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	1 dokumen	114.000.000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Magelang	Jumlah dokumen pengelolaan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	1 dokumen	114.000.000	
	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kab. Magelang	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 dokumen	30.000.000	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kab. Magelang	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 dokumen	43.138.085	Kebutuhan dana lebih tinggi
11	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**		**Cakupan PUS yang ingin ber-KB dan tidak terpenuhi (Unmet Need)**	**12,32%**	**10.937.838.000**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**		**Cakupan PUS yang ingin ber-KB dan tidak terpenuhi (Unmet Need)**	**12,32%**	**10.937.838.000**	
11.1	**Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**		**Frekuensi KIE Program Bangga Kencana**	**50 kali**	**1.871.400.000**	**Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**		**Frekuensi KIE Program Bangga Kencana**	**50 kali**	**1.871.400.000**	
	Pengendalian Program KKBPK	Kab. Magelang	Jumlah laporan pengendalian Program KKBPK	2 laporan	80.000.000	Pengendalian Program KKBPK	Kab. Magelang	Jumlah laporan pengendalian Program KKBPK	2 laporan	80.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	21 laporan	1.056.400.000	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	21 laporan	1.056.400.000	
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Magelang	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	21 laporan	315.000.000	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Magelang	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	21 laporan	315.000.000	
	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Magelang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetakdan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 dokumen	150.000.000	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Magelang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetakdan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 dokumen	150.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Magelang	Jumlah dokumen komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai kearifan budaya lokal	4 dokumen	20.000.000	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Magelang	Jumlah dokumen komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai kearifan budaya lokal	4 dokumen	20.000.000	
	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Magelang	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada stakeholder dan mitra kerja	25 organisasi	250.000.000	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Magelang	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada stakeholder dan mitra kerja	25 organisasi	250.000.000	
11.2	**Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**		**Jumlah kader KB dan PKB yang diberdayakan**	**415 orang**	**1.116.000.000**	**Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**		**Jumlah kader KB dan PKB yang diberdayakan**	**415 orang**	**1.116.000.000**	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Magelang	Jumlah kader yang mengikuti Penggerakan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	372 orang	1.116.000.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Magelang	Jumlah kader yang mengikuti Penggerakan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	372 orang	1.116.000.000	
			Persentase peserta KB aktif menggunakan alat kontrasepsi modern (mCPR)	72,05%				Persentase peserta KB aktif menggunakan alat kontrasepsi modern (mCPR)	72,05%		
11.3	**Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah PUS yang terlayani kesertaan ber-KB**	**148.200 PUS**	**6.648.688.000**	**Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah PUS yang terlayani kesertaan ber-KB**	**148.200 PUS**	**6.648.688.000**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Magelang	Jumlah laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	62 laporan	50.400.000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Magelang	Jumlah laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	62 laporan	50.400.000	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Magelang	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	10.331 orang	3.823.088.000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Magelang	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	10.331 orang	3.823.088.000	
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Magelang	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	21 unit	2.741.000.000	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Magelang	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	21 unit	2.741.000.000	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 laporan	34.200.000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 laporan	34.200.000	
11.4	**Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**		**Jumlah lembaga yang berperan dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB**	**12 lembaga**	**1.301.750.000**	**Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**		**Jumlah lembaga yang berperan dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB**	**12 lembaga**	**1.301.750.000**	
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kab. Magelang	Jumlah dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB	2 dokumen	3.750.000	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kab. Magelang	Jumlah dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB	2 dokumen	3.750.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kab. Magelang	Jumlah Kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung KB	372 Kampung KB	1.298.000.000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kab. Magelang	Jumlah Kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung KB	372 Kampung KB	1.298.000.000	
12	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**		**Cakupan Pembangunan Ketahanan Keluarga**	**62,29%**	**6.694.700.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**		**Cakupan Pembangunan Ketahanan Keluarga**	**62,29%**	**6.882.075.181**	
12.1	**Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		**Jumlah Poktan yang dibina dan dievaluasi Program Pembangunan Ketahanan Keluarga**	**84 kelompok**	**388.400.000**	**Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		**Jumlah Poktan yang dibina dan dievaluasi Program Pembangunan Ketahanan Keluarga**	**84 kelompok**	**575.775.181**	
	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kab. Magelang	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	12 laporan	38.400.000	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kab. Magelang	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	12 laporan	**38.400.000**	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab. Magelang	Jumlah laporan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	5 laporan	50.000.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab. Magelang	Jumlah laporan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	5 laporan	237.375.181	Kebutuhan dana lebih tinggi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab. Magelang	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 unit	300.000.000	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab. Magelang	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 unit	300.000.000	
12.2	**Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		**Jumlah Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan**	**12 kali**	**6.306.300.000**	**Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		**Jumlah Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan**	**12 kali**	**6.306.300.000**	
	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kab. Magelang	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	12 laporan	3.003.000.000	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kab. Magelang	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	12 laporan	3.003.000.000	
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kab. Magelang	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	12 laporan	3.303.300.000	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kab. Magelang	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	12 laporan	3.303.300.000	

Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masuk dalam predikat kinerja **sangat tinggi pencapaiannya.**

Faktor pendorong tingginya capaian kinerja adalah:

1. Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan
2. Antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

Faktor penghambat sehingga capaian kinerja rendah adalah:

1. Beberapa indikator capaian kinerja hanya akan tercapai menyesuaikan permintaan masyarakat.
2. Keterbatasan personil dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 sebagai dokumen perencanaan nasional telah disusun dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Hal tersebut diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan arah kebijakan pembangunan dua tahun ke depan, guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2025-2026 maka tema pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2025 adalah “Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, pembangunan ekonomi berbasis produk unggulan daerah, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup yang didukung tata kelola pemerintahan yang baik”. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 meliputi tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang. Perwujudan kesejahteraan masyarakat didukung oleh empat tujuan, yang salah satunya adalah “Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing adalah mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan. Dukungan sumber daya manusia Kabupaten Magelang yang berkualitas, baik secara fisik maupun mental akan berdampak positif pada segala aspek kehidupan, tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kabupaten Magelang.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 yang sejalan dengan tema pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2025 yaitu “Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, pembangunan ekonomi berbasis produk unggulan daerah, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup yang didukung tata kelola pemerintahan yang baik”. Keberadaan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah berusaha untuk mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan tujuan “Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”.

Adapun tujuan dari Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

- Meningkatnya fungsi kesejahteraan sosial masyarakat secara memadai dan wajar
- Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak
- Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan pembangunan keluarga

Untuk mencapai tujuan tersebut akan dicapai dengan sasaran sebagai berikut :

- Meningkatnya akses terhadap jaminan dan perlindungan sosial
- Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Meningkatnya pelaksanaan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana
- Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 12 Program, 27 Kegiatan, dan 65 Sub Kegiatan. Adapun rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

I. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. **Kegiatan**: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan:

   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. **Kegiatan**: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan:

   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan AS
   2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3. **Kegiatan**: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan:

   1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

4. **Kegiatan**: Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan:

   1) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. **Kegiatan**: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Sub Kegiatan:

   1) Pengadaan Mebel
   2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. **Kegiatan**: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Sub Kegiatan:

   1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

7. **Kegiatan**: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Sub Kegiatan:

   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

1. **Kegiatan**: Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan:

   1) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
   2) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
   3) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

C. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

1. **Kegiatan**: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

   Sub Kegiatan:

   1) Penyediaan Alat Bantu
   2) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
   3) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
   4) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga

Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

5) Pemberian Layanan Kedaruratan
6) Pemberian Layanan Rujukan

2. **Kegiatan**: Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Sub Kegiatan:

1) Penyediaan Permakanan
2) Penyediaan Sandang
3) Pemberian Layanan Rujukan

D. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

1. **Kegiatan**: Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

Sub Kegiatan:

1) Penjangkauan Anak-Anak Terlantar

2. **Kegiatan**: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
3) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
4) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

E. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

1. **Kegiatan**: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1) Penyediaan Makanan
2) Penyediaan Sandang
3) Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
4) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
5) Pelayanan Dukungan Psikososial

2. **Kegiatan**: Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan:

   1) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

II. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

A. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1. **Kegiatan**: Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan:

   1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota

2. **Kegiatan**: Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan:

   1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

3. **Kegiatan**: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan:

   1) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

B. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1. **Kegiatan**: Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan:

   1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan

Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

C. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

1. **Kegiatan**: Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.

   Sub Kegiatan:

   1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

D. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

1. **Kegiata**n: Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan:

   1) Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

A. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

1. **Kegiatan**: Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan:

   1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
   2) Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
   3) Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
   4) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
   5) Penyusunan Profil Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)

B. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

1. **Kegiatan**: Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai

Kearifan Budaya Lokal

Sub Kegiatan:

1) Pengendalian Program KKBPK
2) Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
3) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok).
4) Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
5) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal
6) Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja

2. **Kegiatan**: Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

   Sub Kegiatan:

   1) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
   2) Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan, dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/ PLKB)

3. **Kegiatan**: Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan:

   1) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
   2) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
   3) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

4. **Kegiatan**: Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.

Sub Kegiatan:

1) Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
2) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas

C. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

1. **Kegiatan**: Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

   Sub Kegiatan:

   1) Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
   2) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA)
   3) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA).

2. **Kegiatan**: Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

   Sub Kegiatan:

   1) Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
   2) Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita).

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang Tahun 2025 merupakan penerjemahan kebijakan yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2025 di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta berdasarkan penyesuaian pemetaan pemutakhiran Permendagri no 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renja ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang pada tahun 2025 setelah melalui evaluasi capaian program dan kegiatan serta penghitungan perkiraan pendanaan. Renja ini nantinya juga akan menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Magelang guna mendukung pencapaian sasaran.

Renja SKPD disusun selain mengacu pada RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2025, juga melihat isu-isu penting pada skala nasional maupun provinsi yang berkaitan dengan pelayanan SKPD. Renja disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan posisi, tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan pembangunan, yang nantinya terangkum dalam RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2025. RKPD tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Priortias Plafon Anggaran Kabupaten Magelang (KUA dan PPA) Tahun 2025. KUA dan PPA menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) untuk nantinya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD. Rencana ini sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Dinas Sosial,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sesuai dengan hasil evaluasi Renja tahun berjalan maka diperlukan adanya perubahan dan penyesuaian untuk mencapai sasaran strategis. Untuk itu diperlukan adanya peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga perencanaan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Dengan demikian, penting bagi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaan dokumen, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan seluruh bidang dan SKPD terkait dalam bersama-sama mencapai sasaran yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat Kabupaten Magelang.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Magelang 2025 yang disusun melalui berbagai tahapan. Tujuannya adalah untuk mempertajam menyelaraskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dengan melihat perjalanan pelaksanaan renja tahun berkenaan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kaidah pelaksanaan Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang, antara lain:

1. Evaluasi pencapaian sasaran Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam lima tahun.
2. Pelaksanaan Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang dilakukan melalui DPA Dinas Sosial,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang setiap tahun.

3. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang pada setiap triwulan, pengendalian dan evaluasi, sebagai instrument untuk mengetahui efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang dalam mencapai sasaran dan tujuan Renstra.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan setelah penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 sebagai berikut

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) sebagai bahan persiapan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA dan PPA) 2024;
2. Mengawal pencapaian target Renja SKPD sampai dengan tataran pelaksanaan kegiatan.
3. Melakukan evaluasi terhadap Renja SKPD pada tahun pelaksanaan setelah disesuaikan berdasarkan APBD.

Kota Mungkid, 07 NOVEMBER 2024

KEPALA DINSOS PPKB PPPA
KABUPATEN MAGELANG

BELA PINARSI, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19670120 198703 2 001

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. MAGELANG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**38.414.851.867,00**							**39.969.141.152,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**19.456.186.093,00**							**20.910.475.378,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**19.456.186.093,00**							**20.910.475.378,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah***	**100 Persen**			**100 Persen**	**7.988.373.466,00**						**100 Persen**	**8.392.398.741,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Perangkat Daerah*	63 Dokumen			32 Dokumen	28.981.500,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-	31 Dokumen	36.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	12.548.040,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		18.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				27 Laporan	16.433.460,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		18.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan yang dikelola*	25 Kegiatan			25 Kegiatan	5.792.757.145,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-	25 Kegiatan	5.706.857.690,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/bulan	5.750.382.415,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		5.664.407.690,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	42.374.730,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		42.450.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen kepegawaian yang tersusun*	4 Dokumen			4 Dokumen	100.038.736,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-	4 Dokumen	100.038.750,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	100.038.736,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		100.038.750,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum yang tersusun*	4 Dokumen			2 Dokumen	107.968.784,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-	2 Dokumen	100.875.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	107.968.784,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		100.875.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang diadakan*	22 Jenis			11 Jenis	285.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-	11 Jenis	595.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	30.000.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	255.000.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		565.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan*	4 Dokumen			2 Dokumen	158.643.981,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-	2 Dokumen	158.643.981,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	48.643.985,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		48.643.985,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				132 Laporan	109.999.996,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		109.999.996,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan*	3 Dokumen			3 Dokumen	1.514.983.320,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-	3 Dokumen	1.694.983.320,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				125 Unit	494.983.320,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		674.983.320,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	20.000.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		1.000.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	***Persentase PSKS yang melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial***	**11 persen**			**11 persen**	**432.249.537,00**						**11 persen**	**432.249.537,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pembinaan*	171 Orang			171 Orang	432.249.537,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-	171 Orang	432.249.537,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	60.749.255,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		60.749.255,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				21 Orang	303.750.282,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		303.750.282,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				42 Lembaga	67.750.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		67.750.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis, yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti***	**100 persen**			**100 persen**	**2.872.735.990,00**						**100 persen**	**3.733.000.000,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti*	3952 Orang			1976 Orang	2.430.735.990,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-	1976 Orang	3.591.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				165 Orang	166.633.990,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		440.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	15.000.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				741 Orang	1.953.102.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		2.840.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				700 Orang	70.000.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		70.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				300 Orang	211.000.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		211.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	15.000.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis, dan PMKS lainnya di luar panti yang mendapatkan penanganan di Rumah Singgah*	160 Orang			80 Orang	442.000.000,00			-	-	-	80 Orang	142.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				80 Orang	105.000.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		105.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				80 Orang	15.000.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				70 Orang	322.000.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		22.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	***Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial***	**89,9 persen**			**89,9 persen**	**7.652.345.100,00**						**89,9 persen**	**7.818.345.100,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	*Jumlah anak terlantar yang terpelihara*	40 Orang			20 Orang	70.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-	20 Orang	70.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	70.000.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		70.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fakir miskin yang tertangani*	852813 Orang			852813 Orang	7.582.345.100,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-	852813 Orang	7.748.345.100,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				852813 Orang	425.000.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		425.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				72160 Keluarga	409.000.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		425.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				140000 Keluarga	6.673.345.100,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		6.823.345.100,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	75.000.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		75.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	***Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten***	**100 persen**			**100 persen**	**510.482.000,00**						**100 persen**	**534.482.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial*	700 Orang			350 Orang	440.482.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-	350 Orang	464.482.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				350 Orang	144.032.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		168.032.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	73.950.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		73.950.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				39 Unit	88.600.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		88.600.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	72.900.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		72.900.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	61.000.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		61.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	2 kali			-	70.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	-	1 kali	70.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	70.000.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	-		70.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**18.958.665.774,00**							**19.058.665.774,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**570.553.856,00**							**670.553.856,00**	
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	***Persentase lembaga yang melaksankaan PUG***	**5,7 persen**			**5,7 persen**	**156.000.000,00**						**5,7 persen**	**156.000.000,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga yang melaksanakan PUG*	10 Lembaga			10 Lembaga	50.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-	10 Lembaga	50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota														
			Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				10 Orang	50.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah perempuan yang terlibat dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota*	500 Orang			500 Orang	56.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-	500 Orang	56.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Organisasi	56.000.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		56.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Organisasi perempuan yang dibina*	19 Organisasi			19 Organisasi	50.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-	19 Organisasi	50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	50.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	***Persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani sesuai standar***	**100 persen**			**100 persen**	**126.540.488,00**						**100 persen**	**126.540.488,00**	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	3 Layanan			-	126.540.488,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-	3 Layanan	126.540.488,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Layanan	126.540.488,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		126.540.488,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	***Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar***	**100 persen**			**100 persen**	**161.472.881,00**						**100 persen**	**161.472.881,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah pelembagaan PHA yang terbentuk*	25 Organisasi			25 Organisasi	161.472.881,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-	25 Organisasi	161.472.881,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				25 Organisasi	161.472.881,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		161.472.881,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	***Persentase anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar****	**100 persen**			**100 persen**	**126.540.487,00**						**100 persen**	**226.540.487,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota*	3 Layanan			3 Layanan	126.540.487,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-	3 Layanan	226.540.487,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				3 Layanan	126.540.487,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		226.540.487,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**18.388.111.918,00**							**18.388.111.918,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	***Usia Kawin Pertama (UKP)***	**22,79 Tahun**			**22,79 Tahun**	**660.573.918,00**						**22,79 Tahun**	**660.573.918,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) minimal 20 tahun*	120100 PUS			120100 PUS	660.573.918,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-	120100 PUS	660.573.918,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				2 Laporan	60.000.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	153.035.833,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		153.035.833,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				184 Laporan	290.400.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		290.400.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	114.000.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		114.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	43.138.085,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		43.138.085,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	***Cakupan PUS yang ingin berr KB dan tidak terpenuhi (unmet need)***	**12,32 persen**			**12,32 persen**	**10.937.838.000,00**						**12,32 persen**	**10.937.838.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Frekuensi KIE Program Bangga Kencana*	50 kali			50 kali	1.871.400.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-	50 kali	1.871.400.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				2 Laporan	80.000.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		80.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				21 Laporan	1.056.400.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		1.056.400.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				21 Laporan	315.000.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		315.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				4 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				4 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				25 Organisasi	250.000.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		250.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Jumlah tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB yang diberdayakan*	415 Orang			415 Orang	2.316.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-	415 Orang	2.316.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)														
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				372 Orang	1.116.000.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		1.116.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				1 Laporan	1.200.000.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		1.200.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah PUS yang terlayani kesertaan ber-KB*	148200 PUS			148200 PUS	5.448.688.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-	148200 PUS	5.448.688.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				62 Laporan	50.400.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		50.400.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				10331 Orang	5.364.088.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		5.364.088.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				4 Laporan	34.200.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		34.200.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Jumlah lembaga yang berperan dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB*	12 Lembaga			12 Lembaga	1.301.750.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-	12 Lembaga	1.301.750.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB														
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				2 Dokumen	3.750.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		3.750.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				372 Kampung	1.298.000.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		1.298.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	***Cakupan Pembangunan Ketahanan Keluarga***	**62,29 persen**			**62,29 persen**	**6.789.700.000,00**						**62,29 persen**	**6.789.700.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Poktan yang dibina dan dievaluasi Program Pembangunan Ketahanan Keluarga*	84 Kelompok			84 Kelompok	483.400.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-	84 Kelompok	483.400.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				12 Laporan / Dokumen	38.400.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		38.400.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				5 Laporan	145.000.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		145.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				20 Unit	300.000.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		300.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga*	24 Kali			12 Kali	6.306.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-	12 Kali	6.306.300.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				12 laporan	3.003.000.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		3.003.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				12 laporan	3.303.300.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	-		3.303.300.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	J U M L A H							**38.414.851.867,00**							**39.969.141.152,00**	